

Analisis Ketercapaian Indikator Standar Pembiayaan pada SD Negeri Pamucatan Kabupaten Bandung Barat

Mokhamad Roby Abdussalaam

Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mokhamadrobyabdussalaam@gmail.com

Received: March 2019; Accepted: March 2019; Published: June 2019

Abstrak

Mutu sekolah berkaitan langsung dengan bagaimana kualitas pendidikan pada sebuah satuan pendidikan. Dalam pencapaian mutu sekolah yang baik perlu diperhatikan mutu guru, mutu siswa, kultur dan disiplin sekolah, serta fasilitas dan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini memfokuskan pada kajian capaian indikator manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Tujuannya untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel melalui indikator – indikator dari standar pembiayaan di SD. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di sdn pamucatan rata – rata 80 % - 90 % dari 16 indikator standar pembiayaan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan realisasi pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.

Kata kunci: pelaksanaan standar pembiayaan, indikator.

Abstract

School quality is directly related to the quality of education in an education unit. In achieving good school quality, it is necessary to pay attention to teacher quality, student quality, school culture and discipline, and educational facilities and funding. This research focuses on the study of the achievements of indicators on education financing management and learning facilities for school quality. The aim is to find out the description and analyze the influence of education funding management and learning facilities on school quality. This study uses descriptive analysis method with a quantitative approach. Sampling is through indicators of standard funding in elementary school. The analysis technique uses descriptive analysis. The results of this study indicate that the management of education funding at the pamucatan level averages 80% - 90% of the 16 standard financing indicators. Based on these findings, it is recommended that schools pay attention to the stages of education financing management, especially when planning and realization of financing. Whereas the principle of utilizing facilities needs to be considered the efficiency of the use of learning facilities in order to achieve learning objectives and improve the quality of schools.

Keywords: implementation of financing standards, indicators.

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji

Guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru/dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (*revenue theory of cost*).

Dalam menghitung biaya pendidikan ini, faktor input dan output dari pendidikan serta

proses yang ada didalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dapat dihitung menggunakan teknik (*cost analysis*): (1) *productivity measurement* atau analisa *cost-effectiveness* atau (2) analisa *cost-benefit*. Hasil perhitungan biaya pendidikan dapat mengevaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak baik untuk individu tersebut (*private rate of return*) ataupun untuk masyarakat secara luas (*social rate of return*).

Isu lain berkaitan dengan biaya pendidi-

kan ini adalah: perbedaan pengeluaran anggaran dibidang pendidikan di negara maju dengan negara berkembang, perbedaan biaya sekolah baik di institusi pendidikan negeri maupun swasta. Selain itu juga perbedaan biaya untuk pendidikan termasuk investasi pendidikan terkait dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sistem biaya pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem biaya pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya system dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: (1) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; (2) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling

baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda

Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, maka akan tampak konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni:

- Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan
- Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik
- Keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan
- Keputusan tentang system pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, ada dua hal pokok yang harus dapat dijawab, yakni:

(1) bagaimana sumber daya akan diperoleh dan (2) bagaimana sumberdaya akan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat 2 kriteria untuk menganalisis setiap hal tersebut, yakni: (1) efisiensi yang terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan (2) keadilan yang terkait dengan benefit dan cost yang seimbang.

METODE PENELITIAN

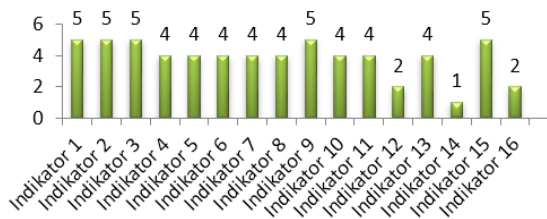
Analisis deskriptif Design penelitian, populasi, sampel, instrumen, skala pengukuran dan teknik analisa dat.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengambilan dan analisis data tentang ketercapaian indikator pada Standar Pembiayaan pada SDN Pamucatan maka dapat disajikan profil ketercapaian indikator Standar Pembiayaan, Distribusi Indikator Standar Pembiayaan, dan masalah serta tindak lanjut perbaikan capaian indikator Standar Pembiayaan sebagai berikut.

1. Profil Ketercapaian Indikator Standar Pembiayaan

Profil ketercapaian 16 (enam belas) indikator standar pembiayaan dapat ditunjukkan melalui grafik 1 berikut.



Grafik 1. Indikator dari Standar Pembiayaan

Grafik 1 menunjukkan indikator dari standar pembiayaan yang berjumlah 16 indikator. Indikator yang paling rendah pada SDN Pamucatan adalah indikator 14.

Grafik 1 menunjukkan profil ketercapaian indikator standar pembiayaan pada SDN Pamucatan. Dari 16 indikator, ada indikator yang perolehan skor nya paling rendah, yaitu indikator 14. Sedangkan indikator yang perolehannya rendah yaitu indikator 12 dan 16.

Indikator 14 standar pembiayaan ini menyangkut aspek pengelolaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat/pemerintah yang hanya memenuhi 1 ketentuan dari 4 ketentuan yang seharusnya dicapai. Sedangkan indikator 12 standar pembiayaan ini menyangkut aspek pembelanjaan dana pembinaan siswa yang hanya 61%-70% dan indikator 16 standar pembiayaan ini menyangkut aspek laporan pertanggung jawaban yang hanya dimiliki dan dilaporkan kepada pemerintah saja. Jumlah skor total yang dicapai pada standar pembiayaan di atas adalah 62 dari skor maksimal 80. Sehingga secara keseluruhan capaian standar proses adalah 77,5%.

Berdasarkan analisis data di atas, diketahui bahwa indikator yang belum mencapai skor optimal adalah jumlah tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian sumbangan dana bersumber dari BOS dan ketercapaian sekolah dengan skor 1 menunjukkan belum bisa mengelola sumbangan dana pendidikan 3 tahun terakhir secara sistematis, transparan, efisien dan akuntabel. Seperti halnya di simpulkan oleh muhajirin (2012) proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) telah dilakukan secara partisipatif. Demikian pula menurut Angraini, Ristya Dwi hubungan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Partisipasi publik negara tidak dapat dicapai tanpa adanya transparansi. Selain itu, pertanggungjawaban dapat menjadi sulit tanpa pengawasan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan

Indikator yang belum optimal atau rendah dicapai oleh sekolah SDN Pamucatan adalah indikator 12 yaitu menyangkut aspek pembelanjaan dana pembinaan siswa yang hanya

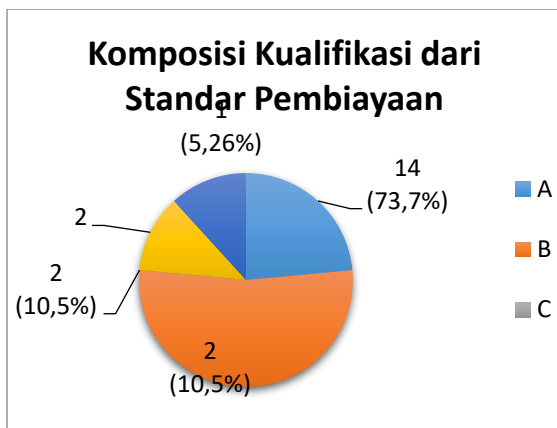
61 %-70%. Tetapi dalam kegiatan pembiayaan pembinaan siswa seperti ekstrakurikuler menggunakan dana iuran siswa. ketercapaian ini rendah hanya mencapai skor 2. Seperti halnya disimpulkan oleh salatiga pada manajemen, siswa dan keuangan memerlukan strategi khusus untuk mengatur aliran dana keluar dan siswa masuk dan keluar dari suatu institusi. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengawasan, dan kemudian akuntansi. Berdasarkan peran penting itu, institusi membutuhkan manajemen yang baik, dalam hal keberadaan dan model yang berlaku.

Indikator yang belum optimal atau rendah dicapai oleh sekolah SDN Pamucatan adalah indikator 16 yaitu menyangkut aspek laporan pertanggung jawaban keuangan yang hanya disampaikan kepada satu pihak saja/pemerintah. ketercapaian ini rendah hanya mencapai skor 2. Seperti halnya disimpulkan oleh salatiga pada manajemen, siswa dan keuangan memerlukan strategi khusus untuk mengatur aliran dana keluar dan siswa masuk dan keluar dari suatu institusi. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengawasan, dan kemudian akuntansi. Berdasarkan peran penting itu, institusi membutuhkan manajemen yang baik, dalam hal keberadaan. Demikian pula menurut Hayati, Endah Dwi. Pelaksanaan anggaran merupakan tanggungjawab masing-masing koordinator standar pendidikan, sedangkan pencatatan anggaran merupakan tanggungjawab bendahara yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan sistem akuntansi sederhana. Masih menurut Hayati, Endah Dwi. Pertanggungjawaban/pengawasan pembiayaan dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban, sedangkan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal dari inspektorat pendidikan, BPKP dan BPK, juga pengawasan melekat oleh kepala sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data dan beberapa hasil penelitian tentang sumbangan pendidikan atau dana pendidikan dari masyarakat/pemerintah, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan kebijakan agar tercapainya pengelolaan yang memenuhi 4 ketentuan. Ketercapaian 4 ketentuan 1) sistematis, 2) transparan, 3) efisien, dan 4) akuntabel dapat menjadikan capaian yang sempurna.

2. Analisis Kesulitan Ketercapaian Standar pembiayaan

Adapun kesulitan, analisis, dan alternative pemecahan masalah ketercapaian indikator pada standar pembiayaan dapat ditunjukkan dengan tabel 1 berikut.



Gambar 2. Komposisi kualifikasi dari Standar pembiayaan

Gambar 2 menunjukkan komposisi pemecahan masalah kesulitan dalam mencapai indikator standar pembiayaan.

Penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang amat penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jamaluddin (Suharsaputra, 2010:265) menyatakan "anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari uang untuk jangka waktu tertentu".

Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Fungsi anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.

Standar nasional pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya standar, guru tidak akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman sebuah kompetensi dasar dalam kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru akan terfokus pada hasil (output) yang harus dicapai, tidak memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Matin (2014:218) menyatakan "standar adalah suatu kriteria yang ditetapkan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan".

Pengawasan dapat artikan pembinaan, dan pelurusan terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Harahap (Aedi, 2014:2) menyatakan bahwa "pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut". Pengawasan penggunaan biaya pendidikan

merupakan aktivitas melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan biaya pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan agar biaya yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai standar pembiayaan di SDN Pamucatan yang penulis dapatkan dari informasi wawancara operator sekolah dan bendahara sekolah. Ada beberapa indikator yang tidak mencapai 100% sempurna.

Diantaranya, indikator 4 bahwa hanya 81% - 90% sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada indikator 5 diketahui 81%-90% sekolah merealisasikan modal kerjasebesar yang tertuang di RKA selama 3 tahun terakhir.

Pada indikator 6 diketahui sekolah sekolah menyampaikan biaya operasional untuk guru dan tenaga kependidikan tentang gaji, honor kegiatan, dan insentif.

Pada indikator 7 diketahui bahwa hanya 81%-90% sekolah merealisasikan rencanaa belanja anggaran pengadaan alat tulis 3 tahun terakhir.

Pada indikator 8 diketahui bahwa hanya 81%-90% sekolah merealisasikan rencanaa belanja anggaran pengadaan bahan dan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran sesuai RKA 3 tahun terakhir.

Pada indikator 10 diketahui bahwa hanya 81%-90% sekolah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa sesuai RKA 3 tahun terakhir.

Pada indikator 11 diketahui bahwa hanya 81%-90% sekolah membelanjakan biaya transformasi daan perjalan dinas serta konsumsi sesuai RKA 3 tahun terakhir.

Berdasarkan proses hasil wawancara tersebut dapat ditarik solusi yaitu berdasarkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam dokumen pelaksanaan anggaran melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara, guru senior, dan komite sekolah. Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran.

Dalam penyusunan anggaran, Sistematis yang akan tertuang dalam anggaran tersebut akan menggambarkan model penyusunan anggaran. Suharsaputra (2010:267) mengemukakan: "sistem anggaran program merupakan

anggaran yang disusun per program dengan subset program yang terkait dengan

program tersebut seperti anggaran untuk penata guru yang di dalam mencakup gaji/upah panitia, gaji/upah penatar, konsumsi selama penataran, dan sebagainya”.

Penggunaan anggaran (biaya) berasal dari APBN, APBD dan ada juga yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Prioritas anggaran terbesar adalah untuk membayar gaji guru/ pegawai, yaitu antara 75-80% dari total anggaran, dan selebihnya untuk non-gaji, terutama untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar. Evaluasi penggunaan biaya pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu.

Matin (2014:205) menyatakan bahwa: Penggunaan anggaran (biaya) pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program pendidikan, menetapkan kriteria sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan, mengantisipasi masa yang akan datang, menyempurnakan rencana dan program tahunan, serta melaksanakan perbaikan pelaksanaan kegiatan, dan menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan yang terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan adalah merupakan kegiatan yang bersifat sistemik dan sistematis

PENUTUP

Berdasarkan temuan tersebut, maka disarankan bagi kepala sekolah sebaiknya menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi, dengan perencanaan, pemetaan dan kebutuhan anggaran terlebih dahulu yang lebih terstruktur, terutama dalam pelaporan pertanggung jawaban sehingga dapat termanage semua kebutuhan sekolah dalam perkembangan peserta didik. Bagi guru diharapkan dapat membantu atau mengevaluasi perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Ristya Dwi. "Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS Di SDN Pacarkeling VIII Surabaya." *Sumber* 21.23 (2001): 21-77.

Atmaja, RM Teguh Eko, Cut Zahri Harun, And Sakdiah Ibrahim. "Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya." *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program*

Pascasarjana Unsyiah 4.1 (2016).

Azhari, Ulpha Lisni, And Dedy Achmad Kurniady. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 23.2 (2017).

Fattah, Nanang. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan Studi Empiris." *Jurnal Pendidikan Dasar* 9 (2008): 1-4.

Hayati, Endah Dwi. "Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah Di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak." *Educational Management* 1.2 (2012).

Muhajirin, Muhajirin. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat. *Educational Management*, 2012, 1.2.

Salatiga, Madrasah Tsanawiyah Negeri Mts N. "Manajemen Kesiswaan Dan Manajemen Keuangan Di Madrasah Dan Sekolah Islam."